



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM
YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Umum yang ditentukan merupakan salah satu pendapatan APBD Transfer yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran;
- b. bahwa agar penggunaan Alokasi Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tepat sasaran dan mempunyai manfaat bagi masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, perlu adanya pengaturan berupa suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56757679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

- Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan;
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah;
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintahan;

Pasal 2

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

- a. penggajian formasi PPPK;
- b. pendanaan Kelurahan;
- c. bidang pendidikan;
- d. bidang kesehatan; dan
- e. bidang pekerjaan umum.

Pasal 3

- (1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan:
 - a. Jumlah formasi PPPK;
 - b. Gaji pokok dan tunjangan melekat; dan
 - c. Jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.
- (2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditentukan berdasarkan satuan biaya per Kelurahan dan jumlah Kelurahan tiap-tiap Pemerintah Kota;
- (3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e pada Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah;
- (4) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada tiap-tiap urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan indeks komposit dari beberapa indikator kinerja tiap-tiap bidang;
- (5) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bidang pendidikan, yang dihitung berdasarkan indikator:
 1. rata-rata lama sekolah;
 2. angka partisipasi murni;
 3. tingkat penyelesaian sekolah;
 4. persentase guru layak;
 5. rasio kelas layak; dan
 6. peta mutu pendidikan.
 - b. bidang kesehatan, yang dihitung berdasarkan indikator:
 1. usia harapan hidup;
 2. persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
 3. persentase bayi, balita yang mendapat imunisasi dasarlengkap; dan
 4. balita dengan gizi normal.

c. bidang pekerjaan umum, yang dihitung berdasarkan indikator:

1. persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak;
2. persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak;
3. kondisi jalan mantap;
4. rasio elektrifikasi; dan
5. kualitas sinyal telepon dan sinyal internet.

Pasal 4

- (1) Penggunaan bagian DAU penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penggunaan bagian DAU pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- (3) Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk kegiatan fisik dan/ atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar.

Pasal 5

Bagian DAU penggajian formasi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pendanaan yang digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi PPPK.

Pasal 6

- (1) Bagian DAU pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban pendanaan bagi Kelurahan;

- (2) Bagian DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk kegiatan fisik dan/ atau nonfisik;
- (3) Bagian DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Kota kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bagian DAU pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; atau
 - b. dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/ atau kinerja Kelurahan.
- (2) indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.

Pasal 8

- (1) Penggunaan bagian DAU bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung;
- (2) Penentuan besaran pendanaan kegiatan fisik dan/ atau nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan prioritas nasional;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait dengan:
 - a. peningkatan capaian SPM bidang pendidikan; dan
 - b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah.
- (4) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang pendidikan;

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
- a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
 - c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 9

- (1) Penggunaan bagian DAU bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/ atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait dengan:
- a. peningkatan capaian SPM bidang kesehatan;
 - b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan; dan
 - c. belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan;
- (4) Belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi bagian DAU bidang kesehatan;
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
- a. belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
- c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 10

- (1) Penggunaan bagian DAU bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/ a tau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pekerjaan umum;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
 - a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
 - c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan Kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6):
 - a. lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Daerah, besaran penganggaran bagian DAU pendanaan Kelurahan dalam APBD dilakukan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikalikan

- dengan jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Kota; atau
- b. lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Pemerintah Kota, besaran penganggaran DAU pendanaan Kelurahan dalam APBD dilakukan paling banyak sebesar alokasi DAU pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD Tahun Anggaran 2023, kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Belanja yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan, dilaksanakan dengan prinsip tidak tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan lainnya.

Pasal 13

Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan mengenai :

- a. Rincian Kegiatan DAU Pendanaan Kelurahan yang Didanai dari DAU Pendanaan Kelurahan untuk Kabupaten/Kota;
- b. Rincian Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota;
- c. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota;
- d. Rincian Sub Kegiatan Pendukung yang didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota;
- e. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota;
- f. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota;

- g. Sub kegiatan Pendukung yang didanai dari DAU Bidang Kesehatan;
- h. Rincian Kegiatan Prioritas yang didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota;
- i. Rincian Sub kegiatan Prioritas yang didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota.

Disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam,
pada tanggal, 17 Februari 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM

dto
ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 17 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto
SAMSUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 3 TAHUN 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
 ALOKASI UMUM YANG
 DITENTUKAN PENGGUNAANYA.

A. Rincian Kegiatan DAU Pendanaan Kelurahan yang Didanai dari DAU Pendanaan Kelurahan untuk Kabupaten/Kota.

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Pembangunan		
1.	Program Pembangunan	Jaringan air minum
2.	Program Pembangunan	Drainase dan selokan
3.	Program Pembangunan	Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah
4.	Program Pembangunan	Sumur resapan
5.	Program Pembangunan	Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman
6.	Program Pembangunan	Alat pemadam api ringan
7.	Program Pembangunan	Pompa kebakaran portabel
8.	Program Pembangunan	Penerangan lingkungan pemukiman
9.	Program Pembangunan	Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya
10.	Program Pembangunan	Jalan pemukiman
11.	Program Pembangunan	Jalan elurahan
12.	Program Pembangunan	Sarana prasarana transportasi lainnya
13.	Program Pembangunan	Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal
14.	Program Pembangunan	Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu
15.	Program Pembangunan	Sarana prasarana kesehatan lainnya
16.	Program Pembangunan	Taman bacaan masyarakat
17.	Program Pembangunan	Bangunan pendidikan anak usia dini
18.	Program Pembangunan	Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini
19.	Program Pembangunan	Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
Program Pemberdayaan		

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Pemberdayaan	Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat
2.	Program Pemberdayaan	Keluarga berencana
3.	Program Pemberdayaan	Pelatihan kader kesehatan masyarakat
4.	Program Pemberdayaan	Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya
5.	Program Pemberdayaan	Penyelenggaraan pelatihan kerja
6.	Program Pemberdayaan	Penyelenggaraan kursus seni budaya
7.	Program Pemberdayaan	Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya
8.	Program Pemberdayaan	Penyelenggaraan pelatihan usaha
9.	Program Pemberdayaan	Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya
10.	Program Pemberdayaan	Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
11.	Program Pemberdayaan	Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya
12.	Program Pemberdayaan	Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan
13.	Program Pemberdayaan	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan
14.	Program Pemberdayaan	Kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya
15.	Program Pemberdayaan	Penyediaan layanan informasi tentang bencana
16.	Program Pemberdayaan	Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
17.	Program Pemberdayaan	Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
18.	Program Pemberdayaan	Edukasi manajemen proteksi kebakaran
19.	Program Pemberdayaan	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya

B. Rincian Kegiatan Prioritas Bidang Pendidikan yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota.

No	Kode	Kegiatan
1.	1.1.2.201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2.	1.1.2.202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3.	1.1.2.203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4.	1.1.2.204	Pengelolaan Pendidikan NonFormal/ Kesetaraan
5.	1.1.3.201	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
6.	1.1.3.202	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal
7.	1.1.4.201	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan NonFormal/ Kesetaraan
8.	1.1.5.201	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
9.	1.1.5.202	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan NonFormal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.	1.1.6.201	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
11.	1.1.7.701	Pengelolaan Pendidikan Dayah

12.	1.1.8.701	Penyelenggaraan Kebiasaan Pendidikan Aceh
13.	1.1.8.702	Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh
14.	1.1.8.703	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh
15.	1.1.8.704	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh
16.	1.1.8.705	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh

C. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota.

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	01.02.2.03.25	01.02.2.03.25	01.02.2.03.25			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	01.02.2.03.01					Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
		01.02.2.01.02	01.02.2.02.02			Penambahan Ruang Kelas Baru
	01.02.2.03.02					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	01.02.2.03.15					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
	01.02.2.03.10	01.02.2.01.17	01.02.2.02.28			Pengadaan Perlengkapan Siswa
	01.02.2.03.11	01.02.2.01.21	01.02.2.02.32			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
		01.02.2.01.08	01.02.2.02.14			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
		01.02.2.01.01	01.02.2.02.01			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	1.01.02.2.03.02	1.01.02.2.01.06	1.01.02.2.02.12	1.01.02.2.04.02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.2.03.04	1.01.02.2.01.12	1.01.02.2.02.24	1.01.02.2.04.04		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
	1.01.02.2.03.03					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
		1.01.02.2.01.18	1.01.02.2.02.29	1.01.02.2.04.05		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
		1.01.02.2.01.19	1.01.02.2.02.30	1.01.02.2.04.06		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			1.01.02.2.02.13			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
	1.01.02.2.03.03					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
				1.01.02.2.04.03		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
			1.01.02.2.02.23			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
			1.01.02.2.02.18			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
		1.01.02.2.01.32				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
			1.01.02.2.02.45			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
			1.01.02.2.02.19			Rehabilitasi

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
						Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
			1.01.02.2.02.44			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
		1.01.02.2.01.10	1.01.02.2.02.16			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Literasi dan Numerasi					01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Numerasi Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
						Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.03.1 5	1.01.02.2.01.26	1.01.02.2.02.39	1.01.02.2.04.14		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
	1.01.02.2.03.1 6	1.01.02.2.01.27	1.01.02.2.02.40	1.01.02.2.04.15		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		1.01.02.2.01.40	1.01.02.2.02.53			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
		1.01.02.2.01.39	1.01.02.2.02.52			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
						Bidang Pendidikan
		1.01.02.2.01.35	1.01.02.2.02.48			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
		1.01.02.2.01.17	1.01.02.2.02.28			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		01.02.2.01.22	01.02.2.02.35			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
		1.01.02.2.01.16	1.01.02.2.02.27			Pengadaan Perlengkapan Sekolah
		1.01.02.2.01.36	1.01.02.2.02.49			Pengembangan konten digital untuk pendidikan
		1.01.02.2.01.37	1.01.02.2.02.50			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
						Pendidikan
		1.01.02.2.01.05	1.01.02.2.02.05			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
		1.01.02.2.01.11	1.01.02.2.02.17			Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
					1.01.03.2.01.05	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar
					1.01.06.2.01.01	Penyusunan Ka mus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota
					1.01.06.2.01.02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
					1.01.06.2.01.05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
						Kabupaten/Kota
					1.01.06.2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah kewenangan Kabupaten/Kota
					1.01.06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/kota
					1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
					1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Nonformal

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
			1.01.02.2.02.15			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
		1.01.02.2.01.09				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	1.01.02.2.03.1 5	1.01.02.2.01.26	1.01.02.2.02.39	1.01.02.2.04.14		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
		1.01.03.2.01.04				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	1.01.02.2.03.1 4	1.01.02.2.01.24	1.01.02.2.02.37	1.01.02.2.04.13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
					1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
						Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
					1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
					1.01.03.2.02.05	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
					1.01.03.2.01.06	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
					1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
						Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
					1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatk	01.02.2.03.26					Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
n Minimal Akreditasi B	01.02.2.03.27					Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	01.02.2.03.17					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	01.02.2.03.03					Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
						PAUD
	01.02.2.03.04					Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	01.02.2.03.05					Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
	01.02.2.03.06					Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	1.01.02.2.03.07					Pengadaan Mebel PAUD
	1.01.02.2.03.07					Pengadaan Perlengkapan PAUD
	1.01.02.2.03.10					Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
	1.01.02.2.03.17					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
	1.01.02.2.03.20					Pemeliharaan Mebel Sekolah
	1.01.05.2.02.02					Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	1.01.05.2.02.01					Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang 1 Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pertumbuhan Proporsi	01.02.2.03.16					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	
Guru						Kependidikan pada Satuan Pendidikan Proporsi Guru PAUD
PAUD Formal dengan kualifikasi s1/d IV	1.01.02.2.03.15					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
Rasio pengawas dan Penilik PAUD	01.04.2.01.01					Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	01.04.2.01.02					Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan

INDIKATOR	KODE SUB KEGIATAN					NOMENKLATUR SUB KEGIATAN
	PAUD	SD	SMP	Kesetaraan	Lainnya	

D. Rincian Sub Kegiatan Pendukung yang didanai dari DAU Bidang Pendidikan untuk Kabupaten/Kota.

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	1.02.02.2.02.16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
2.	1.03.04.2.01.08	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3.	1.03.05.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.	1.03.08.2.01.06	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
5.	1.03.08.2.01.07	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
6.	1.05.03.2.02.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
7.	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Pemberdayaan Masyarakat dalam

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pencegahan Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
8.	1.06.02.2.01.02	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
9.	1.06.04.2.01.05	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
10.	1.06.04.2.01.06	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
11.	1.06.04.2.01.08	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
12.	1.06.04.2.02.07	Rehabilitasi Sosial	Pemberian

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
13.	1.06.04.2.02.08	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Karban HIV/AIDS dan NAPZA
14.	1.06.04.2.02.10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
15.	2.07.03.2.01.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
16.	2.07.03.2.01.03	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
17.	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Swasta
18.	2.08.02.2.02.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
19.	2.08.02.2.03.01	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
20.	2.8.02.2.03.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
21.	2.08.02.2.03.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
22.	2.08.03.2.01.02	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kabupaten/Kota	Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
23.	2.08.04.2.01.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
24.	2.08.04.2.01.03	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
25.	2.08.04.2.02.01	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
26.	2.08.04.2.02.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
27.	2.08.06.2.01.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
28.	2.08.07.2.01.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
29.	2.11.08.2.01.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
30.	2.11.08.2.01.02	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
31.	2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup
32.	2.12.03.2.03.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
33.	2.13.05.2.01.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
34.	2.14.02.2.01.05	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
35.	2.14.02.2.01.06	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kuantitas Penduduk	
36.	2.14.02.2.01.07	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
37.	2.14.02.2.01.08	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
38.	2.14.02.2.01.09	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
39.	2.14.02.2.01.10	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
40.	2.14.02.2.01.11	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
41.	2.19.02.2.01.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
42.	2.19.02.2.01.02	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
43.	2.19.02.2.01.03	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
44.	2.19.02.2.01.04	Penyadaran,	Pemenuhan Hak

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
45.	2.19.02.2.01.05	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
46.	2.19.02.2.01.06	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota
47.	2.19.02.2.01.07	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Beriasa dan/ a tau Berprestasi
48.	2.19.02.2.01.08	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
49.	2.19.02.2.01.09	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
50.	2.19.02.2.02.01	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
51.	2.19.02.2.02.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
52.	2.19.03.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
53.	2.19.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
54.	2.19.03.2.01.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
55.	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
56.	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
57.	2.19.03.2.02.03	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
58.	2.19.03.2.03.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Seleksi Atlet Daerah
59.	2.19.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
60.	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
61.	2.19.03.2.03.04	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Pemberian Penghargaan Olahraga

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Provinsi	Kabupaten/Kota
62.	2.19.03.2.03.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
63.	2.19.03.2.04.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
64.	2.19.03.2.04.02	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
65.	2.19.03.2.04.03	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
66.	2.19.03.2.04.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
67.	2.19.03.2.05.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
68.	2.19.03.2.05.02	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
69.	2.19.03.2.05.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
70.	2.19.03.2.05.04	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
71.	2.19.03.2.05.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
72.	2.19.04.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
73.	2.19.04.2.01.02	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
74.	2.19.04.2.01.03	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
75.	2.19.04.2.01.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
76.	2.19.04.2.01.05	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
77.	2.19.04.2.01.06	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Penyediaan Prasarana dan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kepramukaan	Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
78.	2.19.04.2.01.07	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
79.	2.19.04.2.01.08	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
80.	2.22.02.2.01.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
81.	2.22.02.2.01.02	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
82.	2.22.02.2.02.01	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
83.	2.22.02.2.02.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kabupaten/Kota	
84.	2.22.02.2.02.03	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
85.	2.22.02.2.03.01	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
86.	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
87.	2.22.02.2.03.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
88.	2.22.03.2.01.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
89.	2.22.03.2.01.02	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
90.	2.22.03.2.01.03	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
91.	2.22.04.2.01.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
92.	2.22.04.2.01.02	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
93.	2.22.04.2.01.03	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
94.	2.22.05.2.01.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
95.	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya
96.	2.22.05.2.02.01	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya
97.	2.22.05.2.02.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya
98.	2.22.05.2.02.03	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Cagar Budaya
99.	2.22.05.2.03.01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
100.	2.22.05.2.03.02	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
101.	2.22.06.2.01.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
102.	2.22.06.2.01.02	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
103.	2.22.06.2.01.03	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
104.	2.22.06.2.01.04	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
105.	2.22.06.2.01.05	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
106.	2.23.02.2.01.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Perpustakaan Elektronik
107.	2.23.02.2.01.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
108.	2.23.02.2.01.03	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
109.	2.23.02.2.01.04	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
110.	2.23.02.2.01.05	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
111.	2.23.02.2.01.06	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
112.	2.23.02.2.01.07	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
113.	2.23.02.2.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Bahan Pustaka
114.	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
115.	2.23.02.2.01.10	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
116.	2.23.02.2.02.01	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
117.	2.23.02.2.02.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
118.	2.23.02.2.02.03	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
119.	2.23.02.2.02.04	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Pengembangan Literasi Berbasis

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kabupaten/Kota	Inklusi Sosial
120.	2.23.02.2.02.05	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
121.	2.23.03.2.01.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
122.	2.23.03.2.01.02	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
123.	2.23.03.2.02.01	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
124.	2.23.03.2.02.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
125.	3.25.03.2.02.01	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
126.	3.25.04.2.02.01	Pemberdayaan Pembudi	Pengembangan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Daya Ikan Kecil	Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
127.	3.25.04.2.02.04	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
128.	3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
129.	3.26.02.2.03.06	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
130.	3.26.04.2.02.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Pendidikan
131.	3.26.05.2.01.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
132.	3.26.05.2.01.02	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
133.	3.26.05.2.01.03	Pelaksanaan Peningkatan	Pelatihan Dasar

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)
134.	3.26.05.2.01.06	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
135.	3.26.05.2.01.07	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
136.	3.26.05.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
137.	3.27.07.2.01.05	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
138.	3.32.03.2.01.05	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan Transmigrasi
139.	3.32.03.2.01.06	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Pelatihan Transmigrasi

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kabupaten/Kota	
140.	3.32.04.2.01.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman
141.	5.05.02.2.01.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
142.	5.05.02.2.01.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
143.	5.05.02.2.01.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
144.	5.05.02.2.01.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
145.	5.05.02.2.01.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
146.	5.05.02.2.01.06	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
147.	5.05.02.2.01.07	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
148.	5.05.02.2.01.08	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
149.	5.05.02.2.01.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
150.	5.05.02.2.01.10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengkajian Peraturan	Bidang Keuangan dan Aset Desa
151.	5.05.02.2.01.11	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
152.	5.05.02.2.01.12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
153.	5.05.02.2.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
154.	5.05.02.2.01.14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
155.	5.05.02.2.01.15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Berwenang
156.	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial
157.	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
158.	5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
159.	5.05.02.2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
160.	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
161.	5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
162.	5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
163.	5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
164.	5.05.02.2.02.09	Penelitian dan	Penelitian dan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Pengembangan Tenaga Kerja
165.	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
166.	5.05.02.2.02.11	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
167.	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
168.	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
169.	5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
170.	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
171.	5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
172.	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
173.	5.05.02.2.03.08	Penelitian dan	Penelitian dan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengembangan Kehutanan
174.	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
175.	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
176.	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
177.	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
178.	5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
179.	5.05.02.2.04.01	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
180.	5.05.02.2.04.02	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penerapan Teknologi
181.	5.05.02.2.04.05	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

E. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota.

NO	KODE	KEGIATAN
1.	1.2.2.201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.	1.2.2.202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	1.2.2.203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4.	1.2.2.204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.	1.2.3.201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
6.	1.2.3.202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
7.	1.2.3.203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8.	1.2.4.201	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
9.	1.2.4.202	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.	1.2.4.203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman

		Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
11.	1.2.4.204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
12.	1.2.4.205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
13.	1.2.4.206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
14.	1.2.5.201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.	1.2.5.202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16.	1.2.5.203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

F. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota.

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	1.02.05.2.01.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.	1.02.05.2.02.01	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3.	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu	Pengembangan Mutu

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.	1.02.02.2.01.21	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
5.	1.02.02.2.01.03	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
6.	1.02.02.2.01.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
7.	1.02.02.2.01.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
8.	1.02.02.2.01.20	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
9.	1.02.02.2.01.14	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
10.	1.02.02.2.01.16	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin
11.	1.02.02.2.01.07	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
12.	1.02.02.2.01.06	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas
13.	1.02.02.2.01.05	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit
14.	1.02.02.2.01.10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
15.	1.02.02.2.01.09	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
16.	1.02.02.2.01.08	Penyediaan Fasilitas	Rehabilitasi dan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rumah Sakit
17.	1.02.02.2.02.33	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas
18.	1.02.02.2.02.25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
19.	1.02.02.2.02.28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional
20.	1.02.02.2.02.26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
21.	1.02.02.2.02.04	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
22.	1.02.02.2.02.03	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
23.	1.02.02.2.02.15	Penyediaan Layanan	Pengelolaan Pelayanan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan Gizi Masyarakat
24.	1.02.02.2.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
25.	1.02.02.2.02.01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
26.	1.02.02.2.02.42	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
27.	1.02.02.2.02.10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gamrnuan Jiwa Berat
28.	1.02.02.2.02.41	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
29.	1.02.02.2.02.12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
30.	1.02.02.2.02.40	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
31.	1.02.02.2.02.11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
32.	1.02.02.2.02.07	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
33.	1.02.02.2.02.05	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
34.	1.02.02.2.02.06	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
35.	1.02.02.2.02.09	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
36.	1.02.02.2.02.08	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
37.	1.02.02.2.02.18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kabupaten/Kota	
38.	1.02.03.2.02.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

G. Sub kegiatan Pendukung yang didanai dari DAU Bidang Kesehatan.

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	1.03.03.2.01.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2.	1.03.03.2.01.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
3.	1.03.03.2.01.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4.	1.03.03.2.01.04	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
5.	1.03.03.2.01.05	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
6.	1.03.03.2.01.06	Pengelolaan dan	Peningkatan SPAM

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
7.	1.03.03.2.01.07	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
8.	1.03.03.2.01.08	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
9.	1.03.03.2.01.10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
10.	1.03.03.2.01.11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
11.	1.03.03.2.01.12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
12.	1.03.03.2.01.13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM
13.	1.03.03.2.01.14	Pengelolaan dan	Pengembangan SDM

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
14.	1.03.03.2.01.15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
15.	1.03.03.2.01.16	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
16.	1.03.03.2.01.17	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
17.	1.03.03.2.01.18	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
18.	1.03.03.2.01.19	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
19.	1.03.03.2.01.20	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
20.	1.03.03.2.01.21	Pengelolaan dan	Perbaikan SPAM

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
21.	1.03.04.2.01.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
22.	1.03.04.2.01.02	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
23.	1.03.04.2.01.03	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/ SPA/TPS-R/TPS
24.	1.03.04.2.01.04	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS
25.	1.03.04.2.01.05	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS
26.	1.03.04.2.01.06	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Persampahan
27.	1.03.04.2.01.07	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan	Pembinaan Teknik Pengelolaan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Persampahan
28.	1.03.04.2.01.08	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS
29.	1.03.05.2.01.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
30.	1.03.05.2.01.02	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
31.	1.03.05.2.01.03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
32.	1.03.05.2.01.04	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
33.	1.03.05.2.01.05	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Skala Permukiman
34.	1.03.05.2.01.06	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
35.	1.03.05.2.01.07	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
36.	1.03.05.2.01.08	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
37.	1.03.05.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
38.	1.03.05.2.01.10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
39.	1.03.05.2.01.11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
40.	1.03.05.2.01.12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		dalam Daerah Kabupaten/Kota	Skala Permukiman
41.	1.03.05.2.01.13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
42.	1.03.05.2.01.14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
43.	1.05.03.2.03.01	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penvakit/Wabah Zoonosis Prioritas
44.	1.05.03.2.03.06	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
45.	1.06.04.2.01.05	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
46.	1.06.04.2.01.06	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
47.	1.06.04.2.02.06	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
48.	1.06.04.2.02.07	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
49.	1.06.04.2.02.08	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
50.	1.06.04.2.02.13	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
51.	1.06.06.2.01.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
52.	1.06.06.2.01.02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang
53.	2.08.03.2.02.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Karban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
54.	2.11.03.2.01.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
55.	2.11.03.2.01.02	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaea, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
56.	2.11.03.2.01.03	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
57.	2.11.03.2.02.01	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
58.	2.11.03.2.02.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
59.	2.11.03.2.02.03	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Penghentian Pencemaran dan/ a tau Kerusakan Lingkungan Hidup
60.	2.11.03.2.03.01	Pemulihan Pencemaran	Koordinasi dan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
61.	2.11.03.2.03.02	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
62.	2.11.05.2.01.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
63.	2.11.05.2.01.02	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B
64.	2.11.05.2.02.01	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
65.	2.11.05.2.02.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan
66.	2.11.11.2.01.01	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
67.	2.11.11.2.01.02	Pengelolaan Sampah	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
68.	2.11.11.2.01.03	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
69.	2.11.11.2.01.04	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
70.	2.11.11.2.01.05	Pengelolaan Sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
71.	2.11.11.2.01.06	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
72.	2.11.11.2.01.07	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota
73.	2.11.11.2.03.01	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
74.	2.11.11.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
75.	2.11.11.2.03.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelavanan Pengelolaan Sampah
76.	2.14.02.2.01.15	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk
77.	2.14.02.2.02.13	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelavanan KB
78.	2.14.02.2.02.14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPk

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
79.	2.14.03.2.01.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
80.	2.14.03.2.01.02	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
81.	2.14.03.2.01.03	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
82.	2.14.03.2.01.04	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
83.	2.14.03.2.01.05	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
84.	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Budaya Lokal	(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
85.	2.14.03.2.01.07	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
86.	2.14.03.2.01.08	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pengendalian Program KKBPK
87.	2.14.03.2.02.01	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB
88.	2.14.03.2.02.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
89.	2.14.03.2.02.03	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
90.	2.14.03.2.02.04	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
91.	2.14.03.2.03.01	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat
92.	2.14.03.2.03.02	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
93.	2.14.03.2.03.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
94.	2.14.03.2.03.04	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
95.	2.14.03.2.03.05	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		KB di Daerah Kabupaten/Kota	KB
96.	2.14.03.2.03.06	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
97.	2.14.03.2.03.07	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
98.	2.14.03.2.03.08	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya
99.	2.14.03.2.03.09	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
100.	2.14.03.2.03.10	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		KB di Daerah Kabupaten/Kota	
101.	2.14.03.2.03.11	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
102.	2.14.03.2.03.12	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
103.	2.14.03.2.03.13	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan KB Pria
104.	2.14.03.2.04.01	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
105.	2.14.03.2.04.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber	
106.	2.14.03.2.04.03	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB
107.	2.14.03.2.04.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber	Pembinaan Terpadu Kampung KB
108.	4.01.02.2.02.01	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
109.	7.01.03.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pencegahan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
110.	7.01.03.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

NO	KODE	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
111.	7.01.03.2.05.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
112.	7.01.03.2.05.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
113.	x.xx.01.2.11.03	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
114.	x.xx.01.2.15.03	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

H. Rincian Kegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota.

NO	KODE	KEGIATAN
1.	1.3.2.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.	1.3.2.202	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.	1.3.3.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4.	1.3.4.201	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
5.	1.3.5.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
6.	1.3.6.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam

		Daerah Kabupaten/Kota
7.	1.3.7.201	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
8.	1.3.8.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
9.	1.3.9.201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
10.	1.3.10.201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

I. Rincian Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang Pekerjaan Umum untuk Kabupaten/Kota.

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebiasaan, Strategi dan Teknis SPAM
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM
3.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
4.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
5.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
6.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
7.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
8.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
9.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum
10.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri
11.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
12.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM
13.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
14.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
15.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
16.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
17.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
18.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
19.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
20.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
21.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
22.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
23.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
24.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
25.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
26.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Terpusat Skala Permukiman
27.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
28.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
29.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
30.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
31.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
32.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
33.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
34.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Leger Jalan
35.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
36.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan
37.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar
38.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
39.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan
40.	Penyelenggaraan Jalan	Rehabilitasi Jalan

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Kabupaten/Kota	
41.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan
42.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan
43.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan
44.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Flyover
45.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Underpass
46.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Terowongan/ Tunnel
47.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penggantian Jembatan
48.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pelebaran Jembatan
49.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jembatan
50.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jembatan
51.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
52.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
53.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
54.	Pengelolaan SDA dan Bangunan	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Air Baku
55.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Unit Air Baku
56.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
57.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
58.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Unit Air Baku
59.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
60.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
61.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
62.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
63.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
64.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
65.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Bendung Irigasi
66.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
67.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
68.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Ai+r Tanah

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
69.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
70.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
71.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
72.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
73.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
74.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
75.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI